

KEMISKINAN DAN INTERVENSI, PERSPEKTIF JEFFREY D. SACHS¹

Bernardus Renwarin

Abstract: Sachs' theory regarding the poverty trap actually takes to explaining that someone or a household cannot have a proper life if they do not have required models for living as human beings. To live under the poverty trap means to carry the life without capitals as follows: human, business, infrastructure, natural, public, institutional and cognitive capitals. Sachs found the life without these capitals at the slum areas in Mumbai city, Sauri, Kenya and several other places in the world. This article will show Sachs' idea that people of those areas are being trapped by the extreme poverty. His solution for it is to offer a set of intervention in order to liberate them from those traps. But this solution bears some questions. Then, to what extent does his intervention relate to Indonesian context particularly to overcome the trap of poverty?

Keywords: perangkap kemiskinan • modal sosial • intervensi • kritik • kearifan lokal •

Bila berbicara mengenai persoalan perangkap kemiskinan, Sachs bukanlah orang pertama yang mempersoalkannya. Perangkap kemiskinan dapat diartikan juga sebagai lingkaran kemiskinan atau lingkungan setan kemiskinan.

Perangkap kemiskinan sebenarnya mau menggambarkan keadaan kemiskinan yang ekstrim yang membelenggu seseorang atau sekelompok orang atau suatu kelompok penduduk sehingga seseorang atau sekelompok

¹ Jeffrey D. Sachs adalah Direktur The Earth Institute, profesor di bidang Pembangunan Berkelanjutan, dan profesor di bidang Manajemen dan Kebijakan Kesehatan Universitas Columbia. Ia juga menjadi penasihat khusus PBB baik di masa Kofi Annan maupun Ban Ki-moon dalam program Millennium Development Goals dan menduduki beberapa posisi penting di sekretariat jenderal PBB dan sebagai direktur Jejaring Solusi Pembangunan Berkelanjutan PBB. Ia juga *co-founder* dan pimpinan aliansi Strategi Perjanjian Milenium dan direktur Proyek Milenium Pedesaan. Ia menulis beberapa buku seperti *The End of Poverty* (2005), *Common Wealth: Economics for a Crowded Planet* (2008), and *The Price of Civilization* (2011), *To Move the World: JFK's Quest for Peace* (2013) dan *The Age of Sustainable Development* (2015) (Sumber: <http://www.earthinstitute.columbia.edu/articles/view/1804>).

orang itu tidak dapat keluar dari keadaan yang membelenggu tersebut. Istilah perangkap kemiskinan oleh peneliti lain disebut lingkaran kemiskinan. Istilah ini menggambarkan keadaan kemiskinan ekstrim yang melilit masyarakat dan tidak mempunyai jalan keluar dari kondisi tersebut. Misalnya, Ragnar Nurkse (dalam Rahardjo, 2009: 40-49) menggunakan istilah lingkaran setan kemiskinan yang ditandai oleh produktivitas rendah, pendapatan rendah, tabungan rendah, investasi rendah, kekurangan modal. Menurut Dawam Rahardjo, pertanyaan yang muncul kemudian ialah bagaimana memutuskan mata rantai kemiskinan tersebut? Dikatakannya, menurut Nurkse, mata rantai kemiskinan dapat diputuskan dengan meningkatkan investasi di negara-negara miskin. Selain Nurkse, Moynihan (1969) dan Munker (2001), menggambarkan kemiskinan ekstrim dengan istilah lingkaran kemiskinan. Unsur-unsur yang terkandung di dalam lingkaran kemiskinan pada umumnya sama dengan yang disebutkan oleh peneliti lainnya. Adapun Robert Chambers (1983) menggambarkan kemiskinan di desa dengan menyebutnya kemiskinan terpadu. Chambers menyebut aspek kemiskinan terpadu terdiri dari ketidakberdayaan, kerawanan, kelemahan fisik, kemiskinan dan isolasi.

Mengapa Kemiskinan Perspektif Sachs Diangkat?

Studi Sachs tentang kemiskinan dan pembangunan menarik untuk dipelajari karena beberapa alasan. Pertama, Sachs melakukan studi di daerah pedesaan Afrika, tepatnya di Desa Sauri Kenya dan di daerah *slum* di Kota Mumbai India. Fenomena di kedua tempat ini memperlihatkan bahwa kemiskinan bukan hanya berada di kota tetapi juga berada di tingkat desa. Kedua, berdasarkan studi-studi tersebut Sachs menggagasi sebuah usaha atau tawaran intervensi untuk mengakhiri kemiskinan yang ketika itu studi Sachs ini menjadi bagian dari program gerakan *The Millenium Developmet Goals* yang direncanakan berakhir pada tahun 2015. Ketiga, Sachs mengangkat kasus kemiskinan masyarakat di pedesaan Afrika dan daerah *slum* perkotaan di Mumbai India untuk menunjukkan bahwa pembangunan berlangsung secara tidak merata antara satu negara dengan negara lain, antara wilayah dan daerah, antara kota dan desa. Selain tidak ada pemerataan juga terjadi pembiaran² dan ketidakberpihakan baik dari sisi perencanaan maupun

² Michael Taylor (2007) mengungkapkan hasil pengamatannya di beberapa tempat di Afrika yang memperlihatkan fenomena pembiaran. Masyarakat dibiarkan hidup dalam kemiskinan parah. Ia merumuskan keadaan itu sebagai “kondisi membiasanya



pelaksanaan pembangunan terhadap penduduk desa. Keempat, program-program pembangunan yang ada bias perkotaan.³ Kelima, keadaan kemiskinan parah di desa mendorong orang meninggalkan desa untuk mengadu nasib di kota karena kota dianggap menyediakan berbagai alternatif bagi kehidupan yang lebih layak dalam berbagai aspek kehidupan walaupun dalam kenyataan kehidupan di perkotaan lebih pelik sebagaimana dialami kaum urban di daerah *slum* Mumbai. Kemudian, tawaran intervensi Sachs untuk membebaskan orang miskin dari perangkap kemiskinan menuai pula sejumlah kritikan. Keenam, sebagai seorang ekonom dan pengamat pembangunan ia berhasil mengidentifikasi latar belakang dan permasalahan setempat dan mencoba menawarkan solusi penyelesaian masalah walaupun kemudian muncul sejumlah kritik terhadapnya.

Oleh sebab itu dari sisi tujuan penulisan ada dua hal yang ingin disampaikan di sini. Pertama, ingin mengajak pemerintah, politisi, akademisi, pemuka agama, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, pemerhati dan aktivis pembangunan serta masyarakat untuk melihat dan menyadari realitas kemiskinan baik di kota maupun di desa sebagai fenomena multi aspek. Kedua, sebagai bahan masukan untuk mempertimbangkan strategi alternatif pembangunan bersama menggempur kemiskinan secara lebih komprehensif sampai ke akar-akarnya berbasis kearifan masyarakat setempat.

Realitas Kemiskinan dan Tawaran Sachs

Desa Sauri merupakan bagian dari Distrik Siaya Provinsi Nyansa, kira-kira 44 km dari Kisumu, sebelah barat Kenya, yang dikunjungi Jeffrey D. Sachs bersama kolega-koleganya pada Juli 2004. Menurut Sachs dalam buku *The End of Poverty* (2005), penduduk desa ini berada dalam keadaan lapar, dengan kondisi badan yang kurus, lemah, sakit-sakitan karena menderita AIDS, malaria dan tanpa pelayanan kesehatan. Ratusan anak bersekolah dalam keadaan lapar, karena banyak di antara mereka adalah anak yatim piatu yang hidup melarat. Selain itu ada pula anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena tidak mempunyai uang untuk membeli seragam sekolah serta

penderitaan”. Kondisi ini menimbulkan apa yang disebutnya sebagai “Trauma Teologis”, maksudnya tidak tanggapnya iman kristiani terhadap kondisi penderitaan tersebut.

³ Hans. H. Munkner (dalam Bakhit, 2001: 57) menyatakan, program-program pembangunan dengan bias perkotaan sering melupakan infrastruktur pedesaan, menimbulkan keterbatasan akses ke daerah-daerah pedesaan, mengakibatkan meningkatnya harga *input* dan transportasi untuk berproduksi.



kebutuhan hidup lainnya. Di samping itu keadaan tanah di tempat ini tandus dan luasnya pun amat terbatas. Banyak petani Sauri tidak mampu mengolah tanah dengan metode baru untuk meningkatkan hasil produksi pertaniannya karena tidak mempunyai pengetahuan teknologi pertanian dan mereka tidak mempunyai uang untuk membeli pupuk. Kaum perempuan pada umumnya tidak berpendidikan, selalu bekerja keras dan melahirkan banyak anak. Anak-anak tersebut rata-rata mengalami kekurangan gizi kronis dan usia hidup yang pendek. Orang Sauri hidup di desa tanpa akses terhadap berbagai fasilitas seperti air bersih, sanitasi, transportasi, listrik, alat komunikasi dan bahan bakar.

Menurut Sachs kunjungan tersebut membantunya memahami persoalan kemiskinan ekstrim yang terjadi di wilayah pedesaan. Dikatakannya bahwa daerah-daerah itu dalam kenyataannya lebih suram dari apa yang dijelaskan dalam catatan dokumen petugas-petugas pemerintah. Namun Sachs menyatakan juga bahwa berdasarkan hasil pengamatannya ia melihat peluang untuk mengatasi kemiskinan walaupun desa tersebut hingga saat ini tampaknya belum menjadi bagian dari perhatian program pembangunan pemerintah di berbagai aspek kehidupan, bahkan terkesan diabaikan.

Pengalaman kedua ialah pengalaman mengenai keadaan kaum urban di Mumbai, India. Sachs menyebut beberapa ribu mil dari Sauri Kenya, terdapat suatu komunitas orang miskin di Kota Mumbai, India, yang terperangkap juga dalam realitas kemiskinan ekstrim perkotaan. Kelompok ini ditemui Sachs pada Juni 2004. Orang miskin perkotaan ini berasal dari desa-desa miskin di sekitar Mumbai dan ketika di Mumbai mereka berdiam di tepi jalan kereta api. Dikatakannya, banyak orang dari kelompok ini mati tergilas oleh kereta api, hidup tanpa fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan dan sarana listrik, termasuk kartu tanda penduduk setempat. Pada suatu saat muncul seorang relawan bernama Sheela Patel, peneliti akademik dan relawan yang bekerja juga di daerah tersebut. Berhadapan dengan situasi kemiskinan di Mumbai, Sachs dan Patel berdiskusi bersama komunitas miskin tersebut bukan mengenai kakus, air bersih dan keamanan dari kereta api tetapi tentang pemberdayaan. Tujuannya ialah bagaimana membangun suatu strategi negosiasi dengan pemerintah kota untuk pemberdayaan komunitas ini. Maka dengan bantuan kelompok *Society for the Promotion of Area Resource Centres* (SPARC), dibuat rancangan negosiasi relokasi penduduk *slum* dari daerah rel kereta api ke tempat yang lebih aman, yang dilengkapi dengan fasilitas air bersih, kakus, parit, jalan-jalan yang luas. Tapi sesungguhnya apa yang diharapkan?



Menurut Sachs komunitas ini menyadari keterbatasan mereka sebagai pekerja yang berpendapatan amat kecil sebagai babu, tukang masak, tukang sapu, penjaga rumah, tukang cuci atau menjadi pelayan rumah. Namun, mereka berharap anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan agar nanti hidup lebih baik. Karena dari kenyataan kaum perempuan mengalami penderitaan yang luar biasa, seperti bekerja keras mencari air dari pagi hingga malam hari di pipa air umum dan melakukan pekerjaan lain. Menurutnya, keadaan ini merendahkan martabat perempuan baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan untuk orang muda yang berpendidikan, mereka diberdayakan dan dimotivasi untuk menjadi aktivis politik atau berpeluang mendapatkan pekerjaan lebih baik dari pekerjaan orang tua mereka. Kedatangan mereka dari desa miskin ke kota untuk berjuang mempertahankan hidup supaya bisa tetap eksis, merupakan keputusan yang dibuat kaum urban untuk membebaskan diri dari perangkap kemiskinan, kelaparan dan penderitaan yang melilitnya di desa tempat asal.

Teori Perangkap Kemiskinan Jeffrey D. Sachs

Dari hasil studi di kedua tempat tersebut Sachs sebagai ahli ekonomi dunia menyatakan bahwa kemiskinan ada hubungannya dengan pendapatan keluarga. Menurutnya, pendapatan keluarga sekurang-kurangnya ditentukan oleh empat hal yaitu tabungan untuk akumulasi modal, kegiatan ekonomi sebagai penunjang kehidupan keluarga, pengetahuan teknologi yang sesuai untuk meningkatkan produksi hasil pertanian, sumber daya alam dan lahan-lahan pertanian yang baru serta luas untuk meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan.

Menurut Sachs, ketiadaan empat hal tersebut amat berpengaruh pada pendapatan dan kehidupan keluarga. Dengan kata lain tidak adanya tabungan, tidak adanya usaha ekonomi, kegiatan usaha tanpa dukungan teknologi, sumber daya alam berkurang, adanya kerugian akibat bencana alam, pertumbuhan penduduk tidak sesuai dengan ketersediaan tanah bagi usaha keluarga merupakan faktor-faktor penyebab keterpurukan seseorang atau suatu keluarga.



Gambar 1

Faktor-faktor Penentu Pendapatan Rumah Tangga

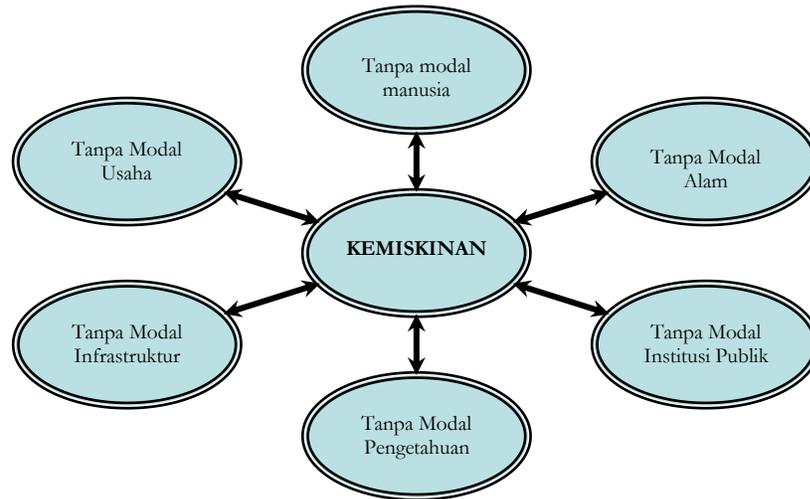


Sumber: Diolah dari Sachs (2005)

Selanjutnya, Sachs menyatakan bahwa *stagnasi* pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya perangkap kemiskinan (*poverty trap*) yang dilatarbelakangi oleh ketiadaan faktor-faktor dasar sebagaimana disebutkan di atas. Sachs kemudian merumuskan yang disebutnya “perangkap kemiskinan” sebagai keadaan ekstrim yang menyebabkan orang miskin tidak mempunyai kemampuan untuk membawa dirinya keluar dari kemiskinan yang dialami. Jadi menurut Sachs, seseorang atau sekelompok orang terperangkap dalam kemiskinan ekstrim seperti di Sauri dan Mumbai karena mereka hidup *tanpa modal minimum* yang diperlukan sebagai pegangan hidup. Modal-modal yang dimaksud adalah: (1) *Human capital*. Modal sebagai manusia meliputi kesehatan diri, gizi dan ketrampilan yang harus ada pada masing-masing pribadi agar dapat menjadi produktif; (2) *Business capital*. Modal bisnis yang diharapkan ada ialah, mesin-mesin, berbagai fasilitas, alat transportasi diperlukan untuk kegiatan pertanian dan industri serta jasa pelayanan lainnya; (3) *Infrastructure*. Infrastruktur dasar yang dibutuhkan seperti jalan, listrik, air dan sanitasi, bandara dan pelabuhan laut, sistem telekomunikasi, merupakan pendukung utama produktivitas bisnis; (4) *Natural capital*. Modal alam berupa tanah yang subur dan baik untuk ditanami, ketersediaan keanekaragaman hayati, berfungsinya ekosistem yang baik merupakan kebutuhan bagi pelayanan lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat; (5) *Public institutional capital*. Modal institusi publik bisa berbentuk hukum dan aturan, sistem perdagangan, sistem peradilan, institusi pemerintah serta kebijakan pelayanan dan pembagian kerja yang baik, dibutuhkan masyarakat untuk menjadi lebih produktif. (6) *Knowledge*

capital. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan modal pengetahuan manusia yang dapat membuat manusia berhasil dan produktif mengembangkan sumber-sumber alam. Ketiadaan modal-modal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2:
Perangkat Kemiskinan J.D. Sachs



Sumber: Diolah dari Sachs (2005)

Pengalaman di dua tempat tersebut memperlihatkan beberapa hal terkait dengan masalah pembangunan dan kemiskinan.⁴ Pertama, desa-desa belum menjadi bagian dari perhatian pembangunan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lain bahkan terkesan diabaikan. Kedua, berbagai wabah penyakit, ketiadaan infrastruktur pelayanan masyarakat, rendahnya kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi serta pelayanan publik yang buruk telah melestarikan keterpurukan masyarakat di desa. Ketiga, kemiskinan di desa mendorong terjadinya migrasi penduduk yang berdampak menimbulkan masalah ekonomi, sosial dan lingkungan hidup di perkotaan. Keempat, pengalaman di Sauri dan Mumbai memperlihatkan bahwa perlu intervensi kebijakan-kebijakan dan strategi pemberdayaan yang tepat untuk membebaskan penduduk dari perangkat

⁴ Daniel P. Moynihan (1969: 9) menggunakan istilah lingkaran kemiskinan, yang meliputi pertama, kemiskinan; kedua, peluang pendapatan yang terbatas; ketiga, budaya dan lingkungan yang menghambat motivasi; keempat, keadaan sakit-sakitan, pendidikan yang tidak memadai, mobilitas rendah, kemampuan pendapatan terbatas.

kemiskinan dan penderitaan kronis menuju hidup yang mandiri dan bermartabat, sesuai dengan situasi setempat.

Menurut Sachs, perangkat kemiskinan terkait pula dengan beberapa keadaan. Pertama, keadaan geografis. Menurutnya, ada negara atau daerah yang mempunyai tanah daratan yang luas, sumber daya alam yang kaya dan subur serta curah hujan yang merata di seluruh daerah, terdapat sungai-sungai yang besar dan dapat dilayari ribuan mil jauhnya, dengan banyak pelabuhan serta alam yang mengagumkan dan potensial untuk berbisnis. Sebaliknya, ada banyak negara atau daerah miskin di dunia mengalami kesulitan karena membutuhkan biaya transportasi yang mahal, daerahnya berada di pegunungan, dengan jarak yang jauh dan tidak bersungai. Keadaan geografis seperti ini memerlukan investasi fisik dan manajemen yang baik terhadap berbagai masalah sehingga dapat membuat orang hidup lebih baik dan tidak terperangkap lagi dalam kemiskinan.

Kedua, masalah keuangan. Sachs berpandangan bahwa pemerintah harus menginvestasi barang-barang publik dan melayani masyarakat, misalnya dengan pelayanan kesehatan dasar, penyediaan sarana prasarana jalan, membentuk berbagai jaringan usaha yang kuat, pembuatan pelabuhan dan sebagainya. Bila pemerintah korup, rakyat tidak dapat dilayani sebagaimana diharapkan dan tidak tepat membebani penduduk dengan berbagai bentuk pajak karena hanya memiskinkan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah yang mempunyai beban utang bawaan yang besar harus meningkatkan penghasilannya untuk membayar utang dengan membatasi diri terhadap investasi yang baru. Karena utang dari masa lalu dapat menghancurkan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Ketiga, pemerintahan yang gagal. Menurut Sachs, bila pemerintah tidak menjalankan fungsi-fungsinya yang paling dasar, sehingga terjadi perang, revolusi, korupsi, hancurnya kehidupan ekonomi, keadaan yang anarkhis dan lain-lain, fenomena tersebut merupakan tanda bagi kita bahwa suatu negara bisa disebut sebagai “negara yang gagal”. Dengan kata lain, negara disebut gagal bukan hanya karena bencana ekonomi tetapi juga gagal karena aparat negara atau aparat pemerintah tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi dasarnya dengan baik.

Keempat, hambatan budaya. Ia juga menyebutkan bahwa unsur budaya bisa menjadi penghalang pembangunan. Dikatakan bahwa norma-norma budaya atau agama dalam suatu masyarakat bisa menghalangi perempuan untuk berperan (Bdk. Munker, 2001: 1-8). Contoh, separuh dari populasi perempuan hidup tanpa hak ekonomi, politik dan pendidikan, sehingga menghambat mereka berkontribusi dalam pembangunan. Hasil



studi tersebut memperlihatkan dalam kehidupan keluarga miskin, perempuan pada umumnya tidak berpendidikan, hanya berperan di bagian belakang dan secara terus-menerus melahirkan enam atau tujuh anak serta tidak mempunyai pilihan selain harus bekerja keras untuk diri dan keluarganya. Dengan demikian, perempuan tidak mempunyai basis ekonomi yang aman dan hak-hak yang legal, mereka mudah disingkirkan dan dimiskinkan tanpa harapan untuk hidup lebih baik. Selain itu, hambatan budaya juga diterapkan dalam interaksi antarkelompok etnik. Kelompok minoritas bisa terhalang dari akses masuk universitas atau pekerjaan-pekerjaan di sektor publik. Mereka bisa dilihat sebagai orang-orang yang mengganggu dalam komunitas tertentu, sehingga dilarang berbisnis, bahkan mengalami tekanan fisik dan psikis terkait kepemilikan. Menurut Sachs, “pembersihan etnis” di Afrika Timur terhadap komunitas India sebagai pedagang, menyebabkan banyak orang melarikan diri dari tempat tinggal mereka merupakan suatu kenyataan pengalaman yang ekstrim terkait tekanan fisik dan psikis.

Kelima, Geopolitik. Sachs juga melihat bahwa garis batas wilayah antarnegara, dapat menghambat orang-orang miskin setempat mengembangkan ekonomi. Hambatan-hambatan ini sewaktu-waktu bisa muncul karena pengaruh hubungan politik yang kurang baik, misalnya bila suatu ketika negara-negara kuat menjatuhkan sanksi perdagangan pada rezim negara tetangga yang tidak disukai. Terkait dengan masalah geopolitik, ada banyak faktor dapat dimanipulasi dengan alasan hubungan luar negeri, seperti faktor perdagangan antarnegara yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.

Keenam, tanpa inovasi. Ia juga melihat bahwa ada perbedaan yang besar antara negara-negara kaya dan negara miskin dalam kecenderungan yang bersifat inovatif. Negara kaya mempunyai pasar besar, yang dapat merangsang peningkatan perubahan-perubahan dan pertumbuhan. Tuntutan pasar dapat mendorong peningkatan inovasi secara luas karena pertumbuhan ekonomi dan proses inovasi berada dalam hubungan proses saling memperkuat secara mutualistis. Negara kaya di Amerika Utara, Eropa Barat dan Asia Timur, melakukan investasi besar-besaran dalam penelitian dan pembangunan dengan ratusan milyar dolar setiap tahun. Akibatnya, selama dua abad secara fundamental ditemukan jurang yang amat besar antara negara paling kaya dan negara yang paling miskin. Negara kaya bergerak dari inovasi ke peningkatan pendapatan serta kekayaan yang berlimpah untuk inovasi lebih lanjut.



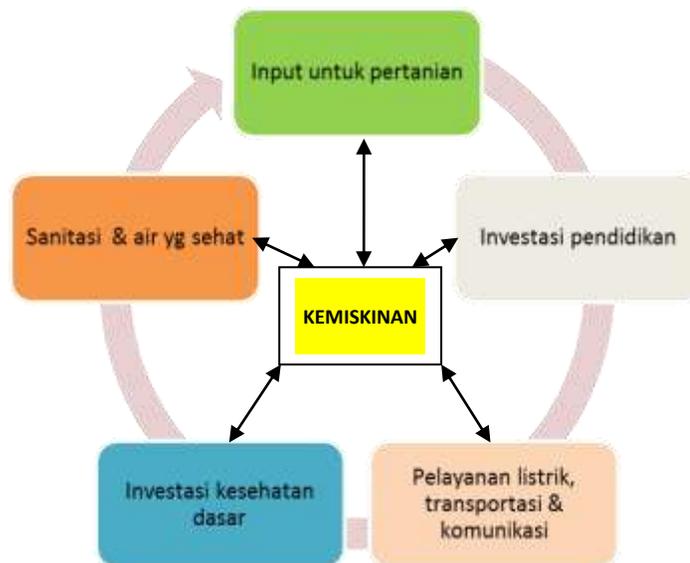
Ketujuh, perangkat kependudukan. Keluarga miskin yang mempunyai banyak anak tidak bisa menghasilkan investasi dalam gizi, kesehatan dan pendidikan bagi setiap anak. Mereka mungkin hanya bisa berhasil menyekolahkan satu anak. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang cepat dan tekanan pada pentingnya perkebunan yang berukuran besar serta sumber daya alam yang banyak dapat membuat hidup orang miskin menjadi lebih buruk karena kehilangan tempat usaha. Perangkat kependudukan yang memiskinkan dapat dihindari dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan perempuan dalam pendidikan, hukum dan aktivitas sosial, keluarga berencana dan pelayanan reproduksi kesehatan.

Pendekatan mengatasi kemiskinan

Bertitik tolak dari studi Sachs terhadap kemiskinan di Desa Sauri dan kaum urban miskin di Mumbai, termasuk berbagai tempat lain di dunia yang dianalisis sebagai faktor-faktor penyebab perangkat kemiskinan, Sachs kemudian menggagasi solusi pengentasan kemiskinan.

Gambar 3

Tawaran Intervensi Pembangunan



Sumber: diolah dari J.D. Sachs (2005)

Menurut Sachs (2005, 227-243), kalau di Afrika orang biasanya berbicara mengenai lima binatang besar yang dapat dilihat di Savannah,

Badan Pembangunan Internasional berbicara tentang intervensi pembangunan terhadap Lima Besar jenis penyakit masyarakat, yaitu kelaparan, penyakit, kematian, kesehatan dan masalah ekonomi. Lima masalah besar di Sauri yang diidentifikasi melalui proyek Milenium PBB yang perlu diintervensi adalah: a) *Agricultural inputs*. Perlu dilakukan perbaikan di bidang pertanian melalui berbagai upaya seperti, pemberian pupuk kimia terhadap tanaman perkebunan, penyediaan sarana prasarana pengairan sehingga para petani dapat memperoleh hasil panen tiga kali lipat banyaknya dan segera dapat mengakhiri kelaparan kronis. Perbaikan juga perlu dilakukan secara khusus terhadap kehidupan kaum perempuan yang merupakan bagian terbesar petani Afrika dan pekerja rumah tangga. b) *Investment in basic health*. Investasi kesehatan dasar dilakukan dengan menempatkan dokter dan perawat di klinik desa. Mereka diharapkan dapat melayani kesehatan umum dan memberikan obat gratis, memberi kelambu tidur untuk mencegah malaria dan pengobatan malaria, penyuluhan pencegahan HIV/AIDS, pemberian *antiretroviral* sebagai terapi tahap akhir, pelayanan kesehatan dasar lainnya termasuk latihan ketrampilan menolong persalinan dan pelayanan kesehatan reproduksi. c) *Investment in education*. Investasi di bidang pendidikan dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak di sekolah. Anak-anak sekolah dasar perlu diberi bantuan makanan sehat untuk memperbaiki kesehatan, agar mereka tetap hadir di sekolah. Kemudian, diperlukan alat-alat pendidikan dan ketrampilan untuk mengajar siswa-siswi ketrampilan sebagai petani modern, ketrampilan mengetik dengan komputer, pengetahuan dasar pemeliharaan infrastruktur (listrik, mesin diesel, generator, air bersih, konstruksi pengeboran, pekerjaan perkayuan) dan lain-lain. d) *Power, transport and communication services*. Kapasitas daya listrik yang besar diperlukan untuk penerangan, pengoperasian komputer sekolah, mesin pompa air, mesin penggiling padi dan keperluan proses makanan, pendinginan, pekerjaan perkayuan, cas baterai rumah tangga serta penerangan untuk anak-anak belajar malam hari dan lain-lain. Dari sisi transportasi, penduduk desa memerlukan mobil truk untuk membawa pupuk bagi petani, bahan bakar untuk keperluan rumah tangga, membawa barang-barang jualan ke pasar di Kisumu. Di samping itu, diperlukan juga mobil untuk menghantar perempuan yang mengalami komplikasi saat melahirkan dan anak yang akut anemia ke rumah sakit, termasuk mobil telepon desa yang dapat digunakan saat emergensi, untuk memberi informasi berkaitan dengan kepentingan desa Sauri dan tempat lain di sekitarnya. e) *Safe drinking water and sanitation*. Dengan air bersih dan kakus yang aman serta peralatan yang baik dan memadai, perempuan dan anak di desa dapat mengambil air setiap hari dengan aman. Air dapat

disediakan dengan berbagai cara seperti pengeboran, penyediaan saringan air bersih dan berbagai teknologi dasar lainnya. Di sana perlu dibangun hubungan jaringan air dengan tangki penampung berskala luas dan stasiun pompa yang berjarak beberapa kilometer jauhnya. Jadi untuk mengakhiri kemiskinan menurut Sachs, harus dimulai dari desa Sauri dan daerah *slum* di Mumbai serta berbagai tempat lain yang serupa dengan kedua tempat tersebut. Setelah melihat gagasan dan tawaran Sachs memberantas kemiskinan, perlu disimak pula catatan ahli ekonomi dunia lainnya terhadap pikiran-pikiran Sachs.

Intervensi pengentasan kemiskinan yang ditawarkan Sachs sebenarnya dilatarbekakangi oleh agenda program *Millenium Development Goals* (MDGs) yang ditetapkan tahun 2000. Seperti diketahui bahwa agenda pokok MDGs ialah menghapus kemiskinan ekstrim di dunia. Agenda pokok penghapusan kemiskinan akan dilakukan melalui penanganan delapan isu atau masalah yaitu, mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar universal, kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi kematian anak, memperbaiki kesehatan ibu, penanggulangan HIV/AIDS dan malaria serta penyakit lainnya, lingkungan yang berkelanjutan dan kemitraan global (Sachs, 2005: 210-225). Ketika program MDGs digagas, target memerangi kemiskinan ekstrim melalui delapan permasalahan yang disebutkan diharapkan akan berhasil pada akhir tahun 2015.⁵ Namun menurut Sachs seluruh usaha memerangi kemiskinan secara realistis kemungkinan akan tercapai pada tahun 2025.

Kritik terhadap Sachs

Setelah mengulas gagasan pengentasan kemiskinan Sachs yang saat itu bertugas sebagai penasihat Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang ekonomi dan pembangunan, kita juga perlu melihat sejumlah catatan kritis sebagai tanggapan terhadap Sachs yang berasal dari beberapa ahli ekonomi

⁵ Dari pengalaman Indonesia, Budi Sulisty (2010), dalam Pengantar Editor, mengutip pernyataan presiden ketika berapat dengan para gubernur se-Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa kemungkinan tiga sasaran MDGs tidak tercapai pada tahun 2015. Ketiga sasaran tersebut ialah angka kematian ibu melahirkan masih tinggi, pencegahan HIV/AIDS dan tutupan lahan di sektor kehutanan yang belum optimal.

pembangunan tingkat dunia. Catatan kritis tersebut antara lain berasal dari Banarjee dan Duflo (2011)⁶ serta dari Acemoglu dan Robinson (2014).

Kritik Banarjee dan Duflo berkaitan dengan beberapa hal yaitu, perihal pemberian bantuan, masalah kesehatan, bantuan teknologi, pendidikan dan permasalahan kependudukan.

Pertama, perihal pemberian bantuan bagi masyarakat. Menurut Sachs, orang miskin perlu diberi bantuan cuma-cuma seperti pembagian kelambu untuk mencegah malaria dan bantuan uang dari orang-orang kaya dunia. Banarjee dan Duflo (2011, 1-10) mengungkapkan bahwa sejumlah ahli ekonomi terkenal lainnya seperti William Easterly dan Moyo, tidak sepaham dengan gagasan Sachs berkaitan dengan pemberian bantuan karena pendekatan tersebut akan lebih memperburuk daripada memperbaiki keadaan masyarakat. Selain itu juga bantuan-bantuan tersebut dapat disalahgunakan oleh institusi lokal yang melakukan korupsi karena mempunyai kepentingan lain. Di samping itu juga bantuan baik dari pemerintah maupun dari lembaga donor internasional dapat menghancurkan pasar-pasar lokal yang menjual barang bantuan yang sama, seperti kelambu dan barang-barang rumah tangga lainnya. Dikatakan oleh keduanya dalam pengalaman, bantuan kelambu dari pemerintah dan lembaga donor telah mengakibatkan kerugian bagi pedagang setempat, sehingga pada saat program bantuan berhenti, tidak ada lagi pedagang yang mau memesan kelambu untuk dijual. Menurut Banarjee dan Duflo, seharusnya masyarakat diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan apa yang mereka mau bukan apa yang diinginkan oleh pendonor. Kritik Banarjee dan Duflo juga terkait dengan bantuan-bantuan seperti pupuk gratis, makanan tambahan anak sekolah, bantuan komputer sekolah dan

⁶ Abhijit Vinayak Banerjee adalah profesor di Jawaharlal Nehru Calcutta University, Harvard University dan Institut Teknologi Massachusetts. Sekarang menjadi profesor pada ekonomi lembaga internasional, presiden biro penelitian asosiasi NBER, CEPR, anggota badan penelitian internasional Institut Kiel, anggota akademi seni dan ilmu pengetahuan Amerika, anggota masyarakat ekonomi Guggenheim, serta lembaga Alfred P. Sloan. Ia menerima banyak penghargaan dan menjadi penasihat sejumlah organisasi seperti Bank Dunia dan Pemerintah India. Esther Duflo adalah ahli di lembaga Abdul Latif Jameel of Poverty Alleviation dan ahli ekonomi pembangunan departemen ekonomi di MIT, pengajar di Ecole Normale Supérieure di Paris, anggota akademi seni dan ilmu pengetahuan Amerika dan masyarakat ekonomi. Ia menerima sejumlah penghargaan, medali John Bates Clark bagi ahli-ahli ekonomi Amerika yang berusia di bawah 40 tahun pada tahun 2010, penghargaan MacArthur Genius Fellowship pada tahun 2009, serta sejumlah penghargaan lainnya. Ia ditetapkan sebagai salah satu dari delapan ahli ekonomi termuda oleh majalah *The Economist*.

sebagainya yang didistribusikan oleh pemerintah dan lembaga donor. Menurut keduanya bantuan tersebut akan membuat masyarakat bergantung pada lembaga-lembaga donor dan pemerintah sehingga tidak akan berusaha mendapatkannya sendiri.

Kedua, perihal kesehatan. Banarjee dan Duflo (2011, 43-46) juga mengatakan bahwa menurut Sachs aspek kesehatan dapat menjebak orang ke dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan. Pengalaman seperti di Zambia memperlihatkan bahwa 50% lebih penduduk yang terjangkit malaria memiliki pendapatan per kapita hanya sebesar sepertiga dari pendapatan per kapita negara-negara yang saat ini penduduknya tidak terjangkit malaria. Hal itu terjadi antara lain karena para pekerja di daerah endemik malaria tidak produktif dalam bekerja dan juga tidak mampu mencegah terjangkitnya malaria, mengakibatkan pendapatannya rendah sehingga membuatnya menjadi miskin. Karena itu perlu adanya bantuan untuk mencegah terjangkitnya malaria termasuk bantuan untuk penyakit lainnya. Menurut Banarjee dan Duflo serta ahli lainnya bahwa tidak jelas apakah negara-negara itu menjadi miskin karena penduduknya terjangkit malaria. Menurut keduanya, tampaknya ketidak-mampuan negara-negara tersebut membasmi malaria merupakan indikator bahwa sistem pemerintahan dan pelayanan kesehatan buruk. Banarjee dan Duflo juga menyatakan bahwa beberapa penelitian lain membuktikan bahwa di beberapa negara yang melakukan kampanye pencegahan malaria memperlihatkan terjadinya pengurangan penderitaan malaria. Anak-anak yang tumbuh dewasa dan terbebaskan dari malaria di beberapa negara seperti di Paraguay, India dan Sri Langka, setelah bekerja ternyata 50% mempunyai pendapatan yang jauh lebih besar dari anak-anak yang selalu terserang malaria. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberantasan malaria berdampak pada pengurangan kemiskinan jangka panjang. Jadi, pengalaman tersebut berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Sachs bahwa malaria menjebak orang dalam kemiskinan berkepanjangan. Selain itu dikatakan juga oleh Banarjee dan Duflo (2011: 51-55) bahwa menurut Sachs pemerintah perlu menyediakan pula pelayanan kesehatan umum yang gratis, padahal dalam kenyataan masyarakat lebih memilih berobat ke dukun. Selain itu, jika ada yang sakit, masyarakat cenderung berobat ke dokter pribadi walaupun harus membayar mahal dan enggan berobat ke dokter atau perawat pemerintah yang disediakan. Hal ini disebabkan karena tenaga medis yang disediakan tidak bekerja dengan baik dan dianggap kurang berkualitas. Contoh, di India ada dokter yang memeriksa pasien dengan sistem 3-3-3. Maksudnya, pasien diperiksa oleh dokter dengan mengajukan 3 pertanyaan, langsung diberikan tiga jenis obat tanpa resep dan interaksi berlangsung dalam waktu kurang dari 3 menit.



Ketiga, perihal teknologi. Sachs berpendapat bahwa pemberian bantuan teknologi merupakan suatu cara untuk membantu orang miskin keluar dari perangkap kemiskinan. Bantuan teknologi seperti penyambungan pipa air bagi orang miskin di rumah-rumah perlu dilakukan. Dikatakan oleh Banarjee dan Duflo, bahwa bantuan tersebut dianggap murah tetapi sesungguhnya merupakan sesuatu yang mahal, karena seperti di India biaya pemasangan dan pemeliharaannya sebesar 190 ruppe per rumah tangga per bulan atau 2.280 rupe per tahun, setara dengan 300.000 kwachas (kw) Zambia tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat. Demikian juga dengan chlorine untuk pembersih air, yang dapat mengurangi diare pada anak-anak dan penduduk lainnya seharga 800 kw per botol, dapat dipakai selama sebulan, pada umumnya tidak dibeli oleh keluarga-keluarga. Sekalipun mendapat potongan harga menjadi 700 kw, hanya 50% penduduk yang membelinya. Sama halnya ketika diberi potongan harga sampai 300 kw per botol, 25% penduduk tidak mau membelinya. Mereka lebih cenderung membeli minyak goreng untuk keperluan rumah tangga. Berbagai bentuk bantuan tersebut dianalogikan Sachs sebagai sebuah tangga yang diberikan kepada masyarakat dengan harapan agar melalui tangga tersebut masyarakat dapat keluar dari kesulitannya. Namun, menurut Banarjee dan Duflo (2011, 47-50), masalahnya ialah tangga tersebut tidak diletakkan pada tempat yang tepat dan juga orang-orang tidak tahu cara untuk naik tangga bahkan di antara mereka ada yang tidak mau naik tangga tersebut untuk keluar dari jebakan kemiskinan yang ada. Dalam keadaan yang demikian sesungguhnya masyarakat membutuhkan pendampingan dan perhatian pihak lain yang dapat memotivasi mereka untuk keluar dari situasi yang membelenggu tersebut.

Keempat, perihal pendidikan. Banarjee dan Duflo (2011, 73-76) mengungkapkan bahwa bantuan penyediaan fasilitas pendidikan berupa sekolah dasar dan tenaga guru yang berkualitas mempunyai dampak yang memperlihatkan bahwa di India 95% anak bersekolah, karena sekolah secara gratis. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pada umumnya kecenderungan anak masuk sekolah dasar mengalami kenaikan. Di Afrika, khususnya di Kenya, Uganda dan Ghana, anak yang berminat sekolah naik dari 50% menjadi 70%, di Asia Tenggara minat sekolah anak ada kecenderungan naik dari 75% naik menjadi 88%. Di samping itu, terjadi pula penurunan angka anak putus sekolah. Tahun 1999, anak putus sekolah di negara-negara tersebut mencapai 103 juta siswa, dan pada tahun 2006 anak putus sekolah menjadi 73 juta. Namun, menurut Banarjee dan Duflo masalahnya ialah bantuan pendidikan dari program *Millenium Development Goals* hanya pada pendidikan dasar dan dengan demikian pengetahuan anak



amat terbatas dan kurang bermanfaat. Selain itu, di sebuah pertemuan di Dakar, India yang disponsori oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) tahun 2000, tentang masalah pendidikan menghasilkan deklarasi yang menempatkan unsur peningkatan mutu pendidikan pada urutan yang keenam. Ini merupakan indikasi bahwa tujuan bantuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas masyarakat kurang diperhatikan. Hal tersebut dapat dibuktikan juga dari pengalaman di beberapa daerah, guru biasanya tidak hadir mengajar 1 hari dari 5 hari kerja wajib. Data lain lagi mengungkapkan bahwa guru sebenarnya tidak serius bekerja, karena pada jam mengajar, guru lebih banyak berada di luar kelas, minum teh, baca koran dan ngobrol. Kenyataan ini pada umumnya di India memperlihatkan 50% guru pada jam mengajar tidak berada di depan kelas, bagaimana keadaan seperti ini dapat mendorong anak belajar. Dari suatu hasil penelitian lain terhadap 1000 anak dari 600 distrik di India yang dilakukan dengan penggunaan sampel acak, memperlihatkan bahwa 35% anak usia 7-14 tahun (*first grade level*) tidak bisa membaca satu paragraf bacaan sederhana, 60% anak (*second grade level*) tidak bisa membaca ceritera sederhana. Ada data pula yang menunjukkan bahwa anak laki-laki dan perempuan yang biasanya membantu orang tua berjualan tidak dapat menghitung tanpa kertas dan pena. Selain itu, beberapa survei seperti di Pakistan dan Kenya menunjukkan situasi mutu pendidikan sebagai berikut. Di Pakistan, 80% anak kelas 3 tidak bisa membaca satu paragraf bacaan untuk anak kelas 1 dan 27% anak kelas 5 tidak bisa membaca suatu paragraf bahasa Inggris sederhana. Kemudian di Kenya 23% anak tidak bisa membaca dalam bahasa Kiswahili (salah satu bahasa pengantar di sekolah dasar) dan 30% anak tidak bisa melakukan perhitungan pembagian dasar. Menurut Banarjee dan Duflo studi-studi tersebut mau memperlihatkan bahwa bantuan pendidikan tanpa menekankan tujuan yang jelas untuk peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu usaha yang tidak bermanfaat. Keduanya juga menyatakan, rendahnya mutu pendidikan di daerah-daerah tersebut diperparah oleh kurangnya kepedulian orang tua mendorong anak-anaknya belajar karena orang tua sendiri belum melihat manfaatnya, yang antara lain juga dipengaruhi oleh pengalaman permintaan tenaga kerja yang pada umumnya hanya memprioritaskan orang-orang yang berpendidikan.

Kelima, aspek kependudukan. Banarjee dan Duflo (2011: 105-111) menyatakan bahwa Sachs melihat kemiskinan yang terjadi di masyarakat dipengaruhi juga oleh masalah pertumbuhan penduduk, sehingga perlu ada kebijakan terkait dengan masalah kependudukan. Pertumbuhan penduduk ternyata telah mengakibatkan antara lain terjadinya kekurangan gizi pada



anak-anak karena kekurangan pangan serta munculnya masalah pendidikan bagi keluarga yang banyak anak. Akan tetapi, menurut Banarjee dan Duflo, ada survei lain yang memperlihatkan bahwa ternyata tidak terbukti bahwa anak-anak dari keluarga kecil lebih berpendidikan daripada anak-anak dalam keluarga yang besar, sebagaimana ditemukan dalam penelitian oleh Nancy Qian di Cina. Juga tidak terbukti bahwa keluarga miskin yang mempunyai banyak anak seolah-olah tidak menganggap penting pendidikan bagi anak-anaknya.

Kritik lain terhadap Sachs juga datang dari Daron Acemoglu dan James A. Robinson (2014). Acemoglu dan Robinson dalam buku, *Why Nations Fail, The Origins of Power, Prosperity and Poverty*, yang diterjemahkan dengan judul *Mengapa Negara Gagal, Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran dan Kemiskinan*, membahas mengenai kesenjangan yang luar biasa antara negara-negara makmur seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jerman serta negara-negara miskin di kawasan Sub Sahara Afrika, Amerika Tengah dan Asia Selatan. Menurut keduanya, kemiskinan dan kemakmuran selama ini ternyata masih dipahami berdasarkan beberapa hipotesis masa lalu sebagai teori yang membenarkan adanya kedua fenomena tersebut. Acemoglu dan Robinson menyebutkan teori-teori yang tak terbukti ialah teori atau hipotesis geografis, hipotesis kebudayaan dan hipotesis kebodohan. Salah satu hipotesis yang disanggah Acemoglu dan Robinson terkait dengan pandangan Sachs tentang kemiskinan dipengaruhi oleh paham hipotesis geografis.

Hipotesis geografis mempunyai beberapa pandangan. Pertama, menurut hipotesis tersebut perbedaan kondisi dan lokasi geografis berpengaruh menentukan suatu masyarakat miskin atau kaya. Daerah-daerah yang kurang menguntungkan secara geografis berada di kawasan Afrika, Amerika Tengah dan Asia Tengah. Di samping letak yang kurang menguntungkan juga iklim daerah ini pada umumnya tropis, sehingga berpengaruh pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Lebih lanjut dijelaskan oleh Acemoglu dan Robinson bahwa Montesquieu, salah seorang filsuf terkenal Perancis bahkan berspekulasi menyatakan orang-orang di daerah tropis pada umumnya mempunyai kecenderungan pemalas, enggan bekerja keras dan berinovasi. Keadaan inilah yang menjadi penyebab utama kemiskinan masyarakat di daerah tropis. Hal senada juga dinyatakan oleh Sachs bahwa masyarakat desa Sauri di Kenya miskin bahkan berada dalam perangkap kemiskinan, antara lain disebabkan oleh keadaan geografis setempat yang kurang menguntungkan, termasuk wabah malaria sebagai



penyakit daerah tropis membuat orang tak berdaya membangun hidup yang sehat dan lebih baik.

Kedua, hipotesis ini menyatakan keadaan geografis negara-negara miskin di daerah tropis mempunyai unsur lapisan tanah subur yang tipis dan mudah digerus erosi bila terjadi hujan deras sehingga tidak mampu menyimpan gizi untuk tanaman.

Ketiga, Acemoglu dan Robinson mengatakan menurut ahli biologi evolusioner Jared Diamond, yang disebut juga oleh Sachs, kesenjangan ekonomi terjadi disebabkan oleh sifat dan karakteristik tumbuhan serta hewan yang berdampak pada produktivitas pertanian. Tersedianya banyak hewan yang dapat dibudidayakan mendorong beberapa sukubangsa mengubah gaya hidup dari pemburu, pengumpul makanan menjadi masyarakat petani. Masyarakat pertanian pada gilirannya mempengaruhi perkembangan teknologi dan taraf hidup di dunia. Namun menurut Acemoglu dan Robinson, hipotesis geografis tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk menjelaskan adanya kesenjangan antara wilayah kaya atau miskin. Karena ternyata negara-negara di Afrika Selatan kawasan sub-Sahara, tergolong negara-negara kaya. Padahal jurang kemiskinan di dunia modern mulai nampak antara negara-negara kaya dan miskin karena distribusi teknologi industri dan produksi manufaktur yang tidak merata. Selain itu kekuatan politik negara-negara penjajah atas koloni-koloni yang bersifat eksploitatif, ekstraktif dan sistem monopoli juga menjadi salah satu sebab terjadinya kesenjangan antarbangsa.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Sachs melihat kemiskinan dari hasil studi yang dilakukannya diakibatkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, penyakit-penyakit kronis, kebijakan pemerintah dan pelayanan institusi publik serta keadaan alam atau keadaan geografis. Oleh sebab itu menurut Sachs untuk mengakhiri perangkap kemiskinan tersebut perlu dilakukan sebuah intervensi bukan hanya oleh pemerintah dan lembaga-lembaga donor nasional tetapi juga melalui badan-badan internasional.

Sebuah Pertimbangan: Kearifan dan Modal Sosial Setempat

Ada pertimbangan-pertimbangan yang ingin dicatat di sini sebagai pendekatan-pendekatan yang sering diabaikan dalam pemberdayaan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Sachs dalam intervensinya di Kenya berdasarkan pendekatan MDGs. Pertimbangan dimaksud di sini ialah

masuknya unsur-unsur lokal masyarakat atau kekuatan kearifan lokal dan modal sosial masyarakat.

Pertama, kearifan lokal. Kritik-kritik di atas yang dibuat oleh Banarjee dan Duflo serta Acemoglu dan Robinson, secara tidak langsung mau mengingatkan kita mengenai betapa pentingnya melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan melalui potensi-potensi lokal masyarakat. Salah satu potensi lokal masyarakat adalah kearifan lokal. Dari pengalaman Nyerere, kita dapat belajar sesuatu yang penting untuk pemberdayaan masyarakat. Dani W. Nabudere (dalam David Simon, 2006: 192-199) menjelaskan, Julius Kambaragwe Nyerere selama menjadi Presiden Tanzania menggunakan pendekatan yang inspiratif melalui strategi *Ujamaa* untuk pemberdayaan masyarakat. Dani menyatakan, menurut Nyerere, *Ujamaa* ditetapkan sebagai “Jalan Ketiga” bagi pembangunan yang modern karena dalam tradisi orang Afrika, keluarga-keluarga hidup dan bekerja sama, memahami bersama apa arti kehidupan. Karena itu ia yakin bahwa pertanian sebagai basis pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kehidupan masyarakat Tanzania bila dilakukan dengan kerja keras dan cerdas. Dikatakannya, Nyerere berpandangan bahwa prinsip-prinsip saling menghormati, berbagi dan mendukung, kerja sama yang produktif dan kerja sama dengan semua yang ada adalah dasar-dasar *human security*, praktek dari kesetaraan manusia dan kedamaian di antara warga masyarakat. Hal-hal tersebut juga merupakan basis pembangunan ekonomi jika pengetahuan dan teknik-teknik produksi modern digunakan. Sebagai tradisionalis Nyerere memuji kebaikan nilai-nilai tradisi Afrika, tetapi sebagai modernis ia juga mengakui bahwa ada keterbatasan dalam tradisi tersebut. Kemudian, ia menyatakan bahwa ada dua penyebab terjadinya kemiskinan: pertama, adanya pembiaran atau pengabaian; kedua, tidak ada langkah-langkah konkrit penanganan keluarga-keluarga miskin.

Dengan begitu harus dikatakan pendekatan Nyerere mengingatkan kita bahwa *Ujamaa* merupakan sebuah kearifan lokal yang tidak dapat dibicarakan terlepas dari *world view* masyarakat. Di dalam *world view* masyarakat terdapat kearifan lokal atau kearifan tradisional. Menurut Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani, (Editor, 2006: 175-187) bahwa:

“ ... kearifan tradisional merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu, mencakup model-model pengelolaan sumberdaya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab.”

Dari rumusan di atas terlihat dengan jelas bahwa kearifan masyarakat atau kearifan lokal berisikan pengetahuan dan nilai-nilai hidup yang mengatur bagaimana hubungan antarmanusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dijalani dalam hidup secara arif. Selain rumusan di atas Keraf (2006: 279-307) dalam tulisannya yang berjudul *Etika Lingkungan* menyatakan bahwa:

“ ... kearifan tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.”

Studi Sachs dan tawaran intervensinya memperlihatkan pendekatan-pendekatan pengempuran kemiskinan yang amat ekonomis, materialistik dan hanya untuk memenuhi target program dalam jangka waktu tertentu, yang mengabaikan nilai-nilai serta potensi sosial-budaya masyarakat seperti kearifan lokal, yang sebenarnya selalu menuntun hidup komunitas.

Kedua, catatan tentang ketiadaan modal. Sebagai seorang ahli ekonomi, Sachs hanya fokus pada persoalan kemiskinan sebagai masalah ekonomi semata-mata yang hanya dapat diintervensi secara ekonomi pula dengan berbagai jenis bantuan. Padahal banyak pengalaman menunjukkan kegagalan cara paham seperti ini dalam menyelesaikan masalah kemiskinan masyarakat. Menurut Sachs semua modal yang ada mempunyai fungsi ekonomi yang belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga orang miskin tetap terperangkap dalam kemiskinan. Sebuah masyarakat sesungguhnya mempunyai modal lain yang penting seperti modal sosial (Bdk. Field, 2010) yang biasanya digunakan untuk membangun hidupnya atau hidup komunitas. Bourdieu (dalam Field, 2010: 23) merumuskan modal sosial sebagai:

“ ... modal hubungan sosial yang jika diperlukan akan memberikan ‘dukungan-dukungan’ bermanfaat: modal harga diri dan kehormatan yang seringkali diperlukan jika orang ingin menarik para klien ke dalam posisi-posisi yang penting secara sosial, dan yang bisa menjadi alat tukar, misalnya dalam karier politik.”

Kemudian, Bourdieu dan Wacquant (dalam Field, 2010: 23) merumuskan arti modal sosial agak berbeda dengan rumusan sebelumnya, yakni:

“ ... jumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seseorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan

lama berupa hubungan timbal balik pengenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan.”

Rumusan modal sosial juga dibuat oleh Coleman (dalam Field, 2010: 38) berbunyi:

“Seperangkat sumber daya yang melekat pada hubungan keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas dan yang berguna bagi perkembangan kognitif atau sosial anak atau orang yang masih muda. Sumber-sumber daya tersebut berbeda bagi orang-orang yang berlainan dan dapat memberikan manfaat penting bagi anak-anak dan remaja dalam perkembangan modal manusia mereka.”

Berdasarkan apa yang dirumuskan oleh Bourdieu, Wacquant dan Coleman, harus dikatakan bahwa manusia atau masyarakat masih mempunyai modal lain yang dapat dimanfaatkan untuk membangun hidup karena manusia senantiasa berada dalam relasi sosial dengan yang lain. Modal sosial ternyata diabaikan oleh Sachs dalam studinya padahal modal sosial merupakan salah satu modal manusia yang penting di samping modal-modal lainnya, seperti yang disebut Sachs. Selain itu Sachs sebagai seorang ekonom juga tidak mempersoalkan masalah kemiskinan sebagai dampak yang disebabkan antara lain oleh situasi atau struktur sosial politik yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik pembangunan. Namun pada kesempatan ini dampak politik terhadap pembangunan pada umumnya dan secara khusus pembangunan ekonomi tidak akan dibahas. Yang mau disoroti lebih jauh ialah relevansi studi Sachs dalam meneropong permasalahan kemiskinan di Papua.

Relevansi Studi Sachs terhadap Kemiskinan di Papua

Ada banyak data atau informasi sebagai hasil penelitian yang menggambarkan situasi kemiskinan di Papua. Sebut saja buku, Barnabas Suebu (2007), “Kami Menanam, Kami Menyiram, Tuhanlah Yang Menumbuhkan”, menjelaskan tentang situasi Paradoks Papua. Istilah Paradoks Papua mau menjelaskan rakyat Papua miskin di atas kekayaan alamnya sendiri. Di dalam buku tersebut dikatakan jumlah rumah tangga di Papua sebanyak 480.578 dan 81,52% di antaranya tergolong rumah tangga miskin.

Dari perspektif Sachs, rumah tangga miskin di Papua sebesar 81,52% dapat dikatakan merupakan rumah tangga-rumah tangga yang hidup tanpa modal manusia, tanpa modal alam, tanpa modal institusi publik, tanpa

modal pengetahuan, tanpa modal infrastruktur dan tanpa modal usaha. Namun dalam konteks Papua menyamakan rumah tangga miskin di Kenya dan Mumbai tanpa modal-modal sebagaimana disebutkan Sachs, tentu merupakan suatu pendekatan dan generalisasi yang keliru. Kekeliruan tersebut terletak pada pemahaman tentang konteks Papua. Dalam konsep paradox Papua jelas disebutkan rakyat Papua miskin di atas alam yang kaya, maka gugurlah pengenalan unsur tanpa modal alam. Kemudian terkait dengan tanpa modal manusia, hendaknya modal manusia dilihat bukan dalam arti seperti modal manusia masyarakat dunia industri. Oleh karena sebagian besar rumah tangga ini hidup di kampung-kampung dengan kebiasaan dan pola hidup subsisten, sehingga modal manusia yang dimilikinya ialah modal manusia subsisten termasuk memiliki moralitas subsisten, yang daripadanya rumah tangga-rumah tangga tersebut hidup dan mensiasati hidupnya.

Dari perpektif pembangunan memang diperlukan pembobotan modal-modal yang diperlukan agar dengan modal-modal tersebut rumah tangga-rumah tangga di kampung-kampung dan di kota-kota dapat membangun hidupnya sesuai proses transformasi yang sedang berlangsung. Artinya modal manusia dan modal pengetahuan yang ada, perlu dikembangkan sedemikian rupa agar modal alam yang ada dapat dikelola sebagaimana mestinya. Demikian pula modal institusi publik perlu dirumuskan agar terdapat modal institusi publik yang berpihak pada rumah tangga-rumah tangga orang Papua yang sebagian besar berada di kampung-kampung, di gunung-gunung, lembah-lembah dan rawa-rawa. Yang tidak kalah penting ialah adanya modal infrastruktur dan modal usaha. Kedua modal ini perlu disiapkan melalui kebijakan-kebijakan pembangunan daerah agar tersedia infrastruktur berupa sarana prasarana pembangunan dan modal usaha yang memadai sehingga memudahkan rumah tangga-rumah tangga beraktivitas, berusaha dan memproduksi dalam arti luas. Karena kemiskinan menurut Sachs berarti ketiadaan modal-modal yang seharusnya ada supaya seseorang atau sekelompok orang bisa hidup, menurut Kacamata Sen (2000), kemiskinan sama dengan keadaan deprivasi. Dalam keadaan deprivasi seseorang hidup tanpa kapabilitas diri yang memadai dan tidak mempunyai akses untuk mengembangkan hidup lebih baik. Maka dalam keadaan deprivasi dan tanpa akses seseorang tidak dapat mengatualisasikan diri sebagai manusia atau sebagaimana mestinya.

Tetapi bentuk-bentuk intervensi seperti apa yang dibutuhkan di Papua untuk mengatasi persoalan kemiskinan? Dalam studi kasus di Kenya dan Mumbai Sachs menawarkan sejumlah intervensi yaitu *input* pertanian,



investasi pendidikan, pelayanan listrik, transportasi dan komunikasi, investasi kesehatan dasar, sanitasi dan air bersih. Menurut hemat saya tawaran Sachs perlu dipertimbangkan sambil memperhatikan apa yang disebutkan ketiadaan modal-modal yang seharusnya ada dalam diri seseorang atau sekelompok orang agar tetap eksis dan mampu mengaktualisasikan dirinya. Namun dalam kondisi Papua perlu diperhatikan hal-hal berikut: sumber daya alam dieksploitasi tanpa batas, mengakibatkan hilangnya sumber daya alam bagi penduduk dan menimbulkan lingkungan alam terdegradasi, terjadi alih fungsi hutan dan lahan yang menghilangkan hak-hak dasar di bidang sosial, budaya dan ekonomi penduduk setempat, terjadi kapitalisasi tanah-tanah penduduk sehingga penduduk kehilangan ruang pencaharian nafkah subsisten, migrasi penduduk dari luar Papua yang tak terkendali berdampak menimbulkan masalah sosial, budaya, ekonomi, politik dan agama yang mengganggu suasana *human security*. Artinya dibutuhkan suatu intervensi yang sinergis dan serius antara berbagai institusi publik yang berpihak pada rumah tangga-rumah tangga miskin dan penduduk setempat serta masyarakat Papua agar terjadi suatu kehidupan berkelanjutan baik dari sisi kehidupan manusia, kesejahteraan dan lingkungan hidupnya. Kemudian, dari sisi pembangunan ekonomi telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan tetapi tidak terjadi distribusi pendapatan secara merata dan signifikan di antara penduduk di Papua. Hal ini dapat dilihat dari fenomena kesenjangan pendapatan yang ada di rumah tangga-rumah tangga baik di kota maupun di kampung-kampung yang mengakibatkan banyak keluarga sulit mengusahakan kehidupan yang lebih baik di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan (Bdk. Dale & Djonga, 2011). Secara singkat dapat dikatakan intervensi pembangunan yang diharapkan ialah intervensi yang mampu meningkatkan kapabilitas penduduk agar ia dapat memanfaatkan aset-aset dan akses hidup sehingga terhindar dari situasi eksklusi sosial dan proses marginalisasi penduduk setempat dengan pendekatan-pendekatan pembangunan yang lebih etis dan demokratis (Bdk. Soedjatmoko, 1980).

Penutup

Pada akhir tulisan ini ada beberapa hal penting yang dapat dicatat sebagai pokok-pokok perhatian bagi pengembangan kebijakan pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan di Papua. Pertama, terkait dengan kritik Banarjee dan Duflo terhadap kebijakan intervensi pembangunan dalam pengentasan kemiskinan. Perlu menghindari sikap membuat generalisasi mengenai berbagai masalah pembangunan terkait dengan



kemiskinan masyarakat dan solusinya. Karena pendekatan-pendekatan kualitatif selalu menunjukkan kekhasan permasalahan masyarakat dalam konteksnya. Kedua, kita perlu melakukan observasi yang lebih luas dan dalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai harapan, pandangan dan cara orang miskin mensiasati hidupnya sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, penyelesaian masalah masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa memanfaatkan potensi-potensi lokal atau kearifan-kearifan setempat. Keempat, persoalan kemiskinan bukan semata-mata merupakan masalah ekonomi tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, budaya, politik dan lingkungan. Sehingga intervensinya pun perlu dilihat secara lebih menyeluruh meliputi aspek-aspek sosial, budaya, politik dan lingkungan.

Dalam konteks Papua pengamatan terhadap persoalan kemiskinan hendaknya tidak dilihat semata-mata sebagai persoalan ekonomi saja tetapi juga perlu dicermati aspek lain seperti sudah disebutkan di atas termasuk persoalan akses dan aset, serta hak-hak sosial, budaya, ekonomi, politik dan lingkungan. Dengan begitu intervensinya pun lebih bersifat menyeluruh meliputi berbagai aspek yang disebutkan di atas secara berkelanjutan menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.



Daftar Rujukan

- Acemoglu, D. & James A. Robinson. 2014. *Mengapa Negara Gagal. Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran dan Kemiskinan. (Terj.)*. PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia. Jakarta.
- Bakhit, Izzedin, dkk. 2001. *Attacking the Roots of Poverty. Menggempur Akar-akar Kemiskinan*. Jakarta: YAKOMA-PGI.
- Banarjee V. A. & Esther D. 2011. *Poor Economic. A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*. New York: Public Affairs.
- Dale, P.J.C & John Djonga. 2011. *Paradoks Papua. Pola-pola Ketidakadilan Sosial, Pelanggaran Hak atas Pembangunan dan Kegagalan Kebijakan Afirmatif, dengan Fokus di Kabupaten Keerom*. Jayapura-Arso-Labuan Bajo: Forum Kerjasama LSM Papua (FOKER LSM), Yayasan Teratai Hati Papua (YTHP) dan Sunspirit For Justice and Peace.

- Ife, Jim & Frank Tesoriero. 2008. *Community Development. Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartodiharjo, H. dan Hira Jhamtani (Eds.). 2006. *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta-Singapore: Equinox Publishing
- Keraf A. S. 2006. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Cetakan ketiga.
- Prisma. 2009. Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi. *Menuju Indonesia Masa Depan*. vol. 28, No. 2, Oktober. Jakarta: LP3ES
- Rahardjo, D. M. Oktober 2009. "Menuju Kemandirian Ekonomi Indonesia," dalam *Prisma*, Vol. 28, No 2, hal. 40-49.
- Sachs, D. J. 2005. *The End of Poverty*. New York: The Penguin Press.
- Sen A. 2000. *Development as Freedom*. New York: Anchor Books.
- Suebu, B. 2007. *Kami Menanam, Kami Menyiram, Tuhanlah yang Menumbuhkan*. Jayapura: Pemerintah Provinsi Papua.
- Sulistyo, Budi. 2010. *MDGs Sebentar Lagi, Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan Di Dunia?* Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Taylor, Michael. 2007. *Dilarang Melarat, Narasi Teologis tentang Kemiskinan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Willis K. 2005. *Theories and Practices of Development*. London dan New York: Routledge.
- Website: <http://www.earthinstitute.columbia.edu/articles/view/1804>).

